



# PENINGKATAN PERAN PRIA DALAM PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN

**POLICY BRIEF**

*Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan*

Tahun 2015

**Ringkasan** : Ketimpangan dan ketidakadilan gender dalam pelaksanaan program keluarga berencana sering terjadi karena asumsinya program keluarga berencana adalah upaya untuk menggiring perempuan dalam menggunakan alat kontrasepsi. Karena *stereotype* yang telah tertanam selama ini membuat orang mendefinisikan bahwa program keluarga berencana adalah program untuk ibu-ibu semata, padahal seorang suami ikut berperan di dalam menciptakan kesejahteraan bagi keluarganya termasuk dalam penentuan jumlah anak. Oleh sebab itu tujuan dari penelitian ini adalah melihat Peran Pria dalam Program KB di Kota Palembang, Sumatera Selatan (Studi Kasus pada Kelurahan 13 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II) . Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu berupa wawancara mendalam dari beberapa informan yang telah ditentukan sesuai dengan pengalaman dan kecakapannya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah peran pria dalam Kb dipengaruhi oleh beberapa Faktor yaitu (1) Faktor Predisposisi yang meliputi budaya KB pria di Palembang dan pengembangan metode sosialisasi KB, (2) Faktor Pemungkin yang meliputi pelayanan Kb yang berkelanjutan serta peran pria tidak sekedar akseptor saja tetapi mendukung pasangan dalam program KB. Dan (3) Faktor Penguat meliputi keputusan ber-KB dan pemenuhan individu dan dukungan tokoh agama dan masyarakat. Sehingga untuk meningkatkan peran pria tersebut hal direkomendasikan adalah (1) Penyuluhan mengenai kesetaraan gender dalam ber-KB hendaknya dilakukan baik untuk wanita maupun pria sehingga pemahaman pria mengenai KB menjadi lebih baik, (2) Perlu ada usaha untuk mendobrak budaya ber-KB yang masih di dominasi oleh kaum wanita dan (3) Perlunya variasi KB pria selain kondom dan vasektomi.

## PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit atau persekutuan terkecil dari masyarakat, dari unit ini kemudian berkembang menjadi unit lebih besar yang disebut suku, kabilah, marga, dan komunitas masyarakat lainnya. Selanjutnya kesatuan suku- suku tersebut akan membentuk suatu persekutuan besar menjadi sebuah bangsa.

Apabila sebuah keluarga atau rumah tangga itu tertib dan teratur, maka bentuk suatu masyarakat itupun akan tertib dan teratur pula, dan demikian pula sebaliknya. Setiap keluarga mempunyai tujuan dan cita-cita yang agung dalam keberlangsungan keluarga. Hal itu untuk

menjamin kemaslahatan setiap unsur dan kesejahteraan hidup sebuah keluarga , sehingga memudahkan pembentukan keluarga mencapai sasaran yang dituju yakni keluarga sakinah. (Nuraini, 2013)

Trend pemakaian alat kontrasepsi di dunia dapat dilihat berdasarkan data dari Amerika Serikat. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan alat kontrasepsi AKDR di dunia sebanyak 13,6% dan di negara maju PUS yang menggunakan alat kontrasepsi masih rendah sebanyak 7,6% dan di negara-negara yang sedang berkembang sudah mengalami peningkatan dengan jumlah 14,5% (BKKBN, 2006) yang dikutip oleh (Nurhalimah, 2013). Di Sumatera

Selatan pemakaian Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) hanya 4,42%, dan Pada tahun 2006, jumlah pasangan usia subur di propinsi Sumatera selatan adalah sebanyak 1.324.839 Pasangan, sedangkan penggunaan kontrasepsi berjumlah 962.792 (72,7%) (Rochma, 2012 : 2).

Dalam menjalankan program keluarga berencana masih banyak terdapat kesenjangan gender terutama peran kaum pria terhadap program keluarga berencana seperti Pengetahuan suami tentang metode KB pria rendah, kesadaran akan keikutsertaan KB pria rendah, tidak tahunya suami akan kesehatan reproduksi dan sebagainya.

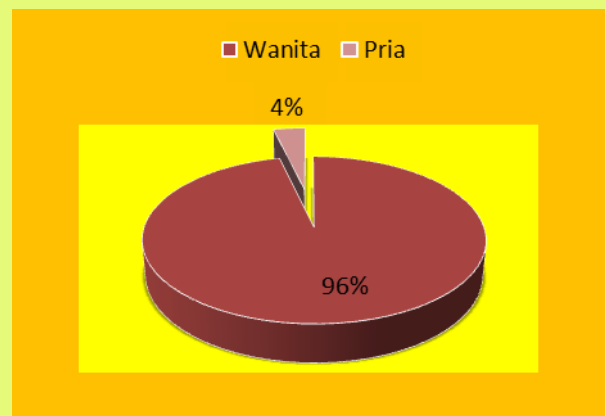
#### **PERMASALAHAN**

Kecamatan seberang ulu II adalah salah satu kecamatan di kota Palembang yang terbagi atas 7 kelurahan yaitu 11 ulu, 12 ulu, 13 ulu, 14 ulu, tangga takat, 16 ulu, dan sentosa.

Pada tahun 2013 setelah melalui beberapa kali perubahan kecamatan seberang ulu II telah memiliki 62 rukun warga dan 263 rukun tetangga. sedangkan jumlah keluarga yang mendiami wilayah ini adalah sebanyak 24 ribu keluarga. komposisi penduduk kecamatan seberang ulu II hampir berimbang antar laki-laki dan perempuan, hal ini dapat dilihat dari sex ratio yang nilainya 99,92 dimana beda penduduk laki-laki dan perempuan hanya sebanyak 39 orang lebih banyak perempuan. Jumlah penduduk yang relatif besar yaitu sebanyak 97 ribu orang, dengan luas 1070 ha maka kepadatan penduduk di tiap ha adalah sebesar 90,74. (<http://palembangkota.bps.go.id/d>) Berdasarkan data tersebut, ternyata terdapat ketimpangan dan ketidakadilan gender dalam pelaksanaan program keluarga berencana.

Disini dapat kita asumsikan bahwa sebenarnya yang selama ini terjadi dalam program keluarga berencana adalah sebagai upaya untuk menggiring perempuan dalam menggunakan alat kontrasepsi. Sehingga peran suami tidak begitu terlihat, karena stereotip yang telah tertanam selama ini yang membawa kita pada suatu definisi bahwa program keluarga berencana adalah program untuk ibu-ibu semata, padahal seorang suami ikut berperan di dalam menciptakan kesejahteraan bagi keluarganya termasuk dalam penentuan jumlah anak.

Sehingga permasalahan yang akan diangkat adalah Peningkatan Peran Pria dalam Program KB di Kota Palembang, Sumatera Selatan khususnya pada Kelurahan 13 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II. Berikut perbandingan peserta pria dan wanita yang aktif sebagai akseptor KB di kelurahan 13 Ulu



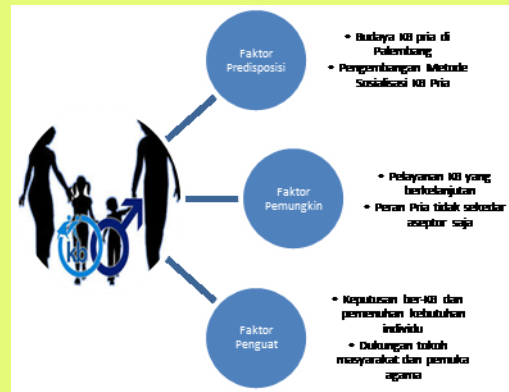
**Gambar 1 Perbandingan jumlah peserta KB Wanita dan Pria**

#### **HASIL PENELITIAN**

Menurut (BKKBN, 2005) menyatakan bahwa Data berbagai survey menunjukkan pengguna kontrasepsi pria masih dibawah 2 %. Meskipun rendahnya pengguna kontrasepsi berkaitan pula dengan keterbatasan teknik

kontrasepsi yang tersedia bagi pria, angka ini menunjukkan bahwa kepedulian pria terhadap keluarga berencana masih rendah (BKKBN, 2005). Hasil survey tersebut wajar adanya apabila melihat kembali dipertengahan tahun 2005, trend atau isu persamaan gender masih dibawah ambang kewajaran, kenyataan yang membatasi perempuan masih dibawah laki-laki masih sangat kuat sehingga program KB dicitrakan adalah programnya kaum perempuan karena kaum laki-laki adalah penguasanya dan perempuan harus mengikuti arahan dari laki-laki sebagai 'imam'nya. Yang terjadi adalah adanya ketimpangan gender, dimana perempuan dibebani dengan berbagai permasalahan pasca melahirkan dan di satu sisi lain dituntut untuk selalu untuk menjadi pemuas laki-laki untuk terus menghasilkan keturunan dimana disisi lainnya dituntut untuk membatasi kelahiran karena angka jumlah penduduk yang padat.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa terdapat tiga faktor yang berpengaruh dalam peran pria untuk berpartisipasi dalam program KB di Palembang yaitu (1) Faktor predisposisi yang meliputi budaya KB pria di Palembang yang belum lazim serta metode sosialisasi yang masih dilakukan hanya pada akseptor wanita saja, (2) Faktor Pemungkin yang meliputi kemungkinan program KB pria yang berlekanjutan dan peran pria dalam KB tidak hanya sebagai akseptor saja, (3) Faktor Penguat yang meliputi bahwa keputusan ber KB disesuaikan dengan pemenuhan kebutuhan individu dan dukungan tokoh agama dan masyarakat sebagai dukungan peran pria dalam program KB.



Gambar 2 Faktor-Faktor yang mempengaruhi KB Pria

## IMPLIKASI KEBIJAKAN

Rekomendasi yang diberikan berdasarkan penelitian ini adalah :

1. **Penyuluhan mengenai kesetaraan gender dalam ber-KB hendaknya dilakukan baik untuk wanita maupun pria sehingga pemahaman pria mengenai KB menjadi lebih baik.**

Seperti yang diterangkan oleh Ibu Dewi selaku PLKB kecamatan seberang ulu 2 kota Palembang, bahwa dalam pelaksanaannya, program sosialisasi KB Pria seringkali digabungkan pada kegiatan-kegiatan PKK, penyuluhan-penyuluhan di puskesmas setempat di kecamatan dimana adalah para istri atau perempuan dan diharapkan dapat menjadi perantara penjelasan kepada para suaminya di rumah. Hal ini belum bisa dikatakan efektif 100% dikarenakan pada saat penyuluhan hanya berupa penyampaian hal-hal yang sifatnya penjelasan umum, tidak disertai penjelasa secara visual sehingga penerimaan ibu-ibu yang mengikuti sosialisasi kegiatan tersebut hanya pada bagian kulit luarnya saja

2. **Perlu ada usaha untuk mendobrak budaya ber-KB yang masih di dominasi oleh kaum wanita**

Di Palembang, masih menganut budaya dimana laki-laki diatas derajatnya dibandingkan perempuan, dalam hal ini persamaan gender memang sudah mulai di perhitungkan namun adat istiadat, budaya masih dijalankan. Seperti misalnya dalam sebuah acara, laki-laki atau suami diharuskan makan terlebih dahulu , setelah selesai baru perempuan atau istri bisa memulai makan. Sehingga program KB untuk pria ini terkesan seperti menjatuhkan harkat dan martabat pria atau suami karena masih sering dikaitkan dengan istilah bahwa jika pria ber KB maka pria tersebut di 'kebiri'.

3. **Perlunya variasi KB pria selain kondom dan vasektomi**

Karena pemahaman yang kurang dari pria mengenai KB pria terutama vasektomi, maka pria hanya mau menggunakan kondom saja sebagai alat kontrasepsi. Sedangkan untuk KB vasektomi masih dianggap “negatif” karena kurangnya pemahaman mengenai vasektomi.

<http://erlinnurhalimah.blogspot.com/2013/05/kti-bab-i-akdr.html> diakses tanggal 25 Mei 2015

Rochma, KM, 2012 *Hubungan Pengetahuan dan Paritas edngan Pemakaian Ala Kontrasepsi dalam Rahim (AKDR) Di Wilayah Kerja Puskesmas Gandus Palembang Tahun 2012.* melalui : [http://poltekkespalembang.ac.id/userfiles/files\\_es](http://poltekkespalembang.ac.id/userfiles/files_es) diakses tanggal 25 mei 2015

[www.palembangkota.bps.go.id](http://www.palembangkota.bps.go.id) diakses tanggal 26 Mei 2015

#### REFERENSI

BKKBN. 2005. *Peningkatan Partisipasi Pria Dalam KB dan KR.* Jakarta : P3TP

Nuraini, Irma. 2013 *,Keluarga Berencana Berkeadilan Gender Sebagai Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah,* Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Unversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nurhalimah, Erlin. 2013, *Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) Part 1.* Dalam

*Policy brief*ni ditulis oleh Ch. Desi Kusmindari, MT, Rahma Shanti Zinaida, M,I.kom, Yanti Pasmawati, MT dan Drs. Deni Saputra, M. Kes yang dibiayai oleh anggaran DIPA Puslitbang Kependudukan tahun 2015.  
Isi sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.